



Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dalam Menanggulangi Dampak Sosial Ekonomi Petani Perhutanan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 di KPH Pesawaran, Lampung

Training for Strengthening the Human Resources Capacity Overcoming the Socio-Economic Impact on Social Forestry Farmers Due to the Covid-19 Pandemic at Pesawaran FMU, Lampung

Christine Wulandari^{1,2,3}, Samsul Bakri^{1,2,3}, Rahmat Safe'i^{1,2,3}, Rudi Hilmanto^{1,2},
Jacky Michael Pah², Putra Pangestu¹

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

² Program Studi Magister Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

³Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

*Korespondensi: christine.wulandari@fp.unila.ac.id

Diterima (Received):

08-September-2022

Diterima (Accepted):

03-November-2022

Terbit (Published):

04-November-2022

ABSTRAK

Pengelolaan hutan tingkat tapak merupakan peran kunci pemerintah dalam mengatasi gangguan dan kendala yang mengancam keberadaan atau kelestarian hutan. Kendala tersebut terutama dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pembentukan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang kuat. Secara spesifik dalam rentang waktu 3 tahun ini penting untuk juga menyikapi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan SDM dalam pengelolaan hutan dan memperkuat sistem kelembagaan petani pengelola hutan. Metode penyuluhan yang digunakan adalah diskusi interaktif yang dipimpin oleh tim dosen dari Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Penilaian hasil pre-test dan post-test didasarkan pada hasil yang dihitung dengan menggunakan metode scoring untuk menilai keberhasilan pembinaan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom. Hasil *post test* menunjukkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) berhasil memberikan pengetahuan dan wawasan tentang optimalisasi dan penguatan sistem kelembagaan termasuk kapasitas SDM KPH yang diharapkan mampu menanggulangi dampak negatif situasi sosial dan ekonomi petani hutan sosial dalam pengelolaan KPH akibat pandemi COVID-19. Hal ini penting karena pandemi COVID-19 sangat berdampak pada aspek sosial ekonomi di berbagai aktivitas petani sekitar hutan. Kegiatan PKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan staf KPH Pesawaran dalam mengatasi dampak sosial ekonomi petani perhutanan sosial akibat pandemi Covid-19.

ABSTRACT

Kata Kunci:

**pengelolaan, kelembagaan ,
sumber daya manusia**

Keywords:

**management, institutions,
human resources**

Forest management at the site level is a key role for the government in overcoming disturbances and obstacles that threaten the existence or sustainability of forests. These obstacles are mainly in the strengthening of human resources (HR) and the formation of a strong Forest Management Unit (FMU) organization. Specifically, in the span of 3 years, it is important to also address the negative impact of the COVID-19 pandemic on the socio-economic conditions of the community. The purpose of this community service activity is to optimize the human resource management system in forest management and strengthen the institutional system of forest management farmers. The extension method used is an interactive discussion led by a team of lecturers from the Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Lampung. The assessment of the results of the pre-test and post-test is based on the results calculated using the scoring method to assess the success of coaching. Implementation of community service online using the Zoom application. The results of the post test show that the results of community service (CS) have succeeded in providing knowledge and insight into optimizing and strengthening institutional systems including the capacity of KPH human resources which are expected to be able to overcome the negative impact of the social and economic situation of social forest farmers in KPH management due to the COVID-19 pandemic. This is important because the COVID-19 pandemic has greatly impacted the socio-economic aspects of various farmer activities around the forest. The CS activities have a positive impact on increasing the knowledge of the Pesawaran KPH staff in overcoming the socio-economic impacts of social forestry farmers due to the Covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan ditingkat tapak atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan suatu peran pokok pemerintah dalam mengatasi gangguan yang mengancam keberadaan atau kelestarian hutan. Ancaman keberadaan kawasan hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ekonomi, sosial, atau ekologi dan kebutuhan lahan pertanian (Sylviani & Hakim. 2014). Saat ini juga ada faktor lainnya yang perlu jadi pertimbangan yaitu adanya pandemic COVID-19 di Indonesia maupun dunia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan adanya kebijakan pembangunan yang dikoordinir lembaga di tingkat tapak yaitu melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Adanya lembaga ini merupakan program prioritas pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hutan juga memperkuat desentralisasi bidang kehutanan.

Adanyan kesadaran pengelolaan hutan pada tingkat tapak melalui KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) mulai muncul sesudah terbit PP No.6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Tujuan dari adanya Pembangunan KPH adalah mulai dari penetapan wilayah, pembentukkan organisasi, penyusunan rencana kerja, identifikasi dan inventarisasi sumber daya KPH, pengetahuan dan kemampuan teknis pengelolaan hutan serta termasuk dalam pemasarannya (Dinas Kehutanan, 2010). Pembentukan Lembaga KPH dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, social budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat (Syukur, 2012). Dengan demikian, Sumberdaya Manusia (SDM) yang ada didalamnya juga harus secara cermat mempertimbangkan hal-hal tersebut.

Pembentukan KPH di Provinsi Lampung ternyata juga menemui kendala karena tidak seluruh instansi dalam jajaran pemerintah daerah memberikan dukungan dalam pembangunan KPH. Minimnya dukungan tersebut terutama dalam hal penguatan SDM dan juga dalam pembentukan organisasi KPH yang kuat. Hal lainnya termasuk terbatasnya pengertian dan pemahaman aparatur daerah terhadap fungsi dan manfaat KPH bagi pembangunan kehutanan dan terbatasnya SDM yang memahami dan mempunyai kapabilitas untuk menjalankan organisasi KPH (Kartodihardjo *et al.*, 2011). Kondisi ini terasa lebih memberatkan di tingkat KPH karena adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan hingga lebih 2 tahun bahkan mendekati 3 tahun.

Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam melaksanakan program-programnya. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, maka hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah akan dilakukan berdasarkan asas desentralisasi dan juga dekonsentrasi. Otonomi daerah dimaksudkan adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini (Tinambunan, 2015). Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu menata dan mengelola potensi SDM yang ada di setiap KPH untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, termasuk KPH Pesawaran yang sedang melaksanakan percepatan pencapaian target perhutanan sosial. Dalam mencapai tujuan percepatan tersebut tentu saja perlu ada penguatan kapasitas SDM dalam mengelola KPH Pesawaran terutama dalam menanggulangi

dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan kondisi di lapang tersebut maka perlu dilakukan PKM ini dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman staf yang ada sehingga dapat mendukung tujuan KPH sebagai berikut: [1] Mengoptimalkan sistem pengelolaan SDM dalam melakukan pengelolaan hutan di KPH Pesawaran, dan [2] Memperkuat sistem kelembagaan petani hutan dan KPH melalui penguatan SDM keduanya.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi *zoom* dan dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB pada Hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020. Para staf KPH Pesawaran sebanyak 20 orang staf KPH dan lembaga lain yang relevan mengikuti kegiatan ini secara online di kantor KPH Pesawaran.

Metode yang digunakan pada PKM adalah diskusi interaktif dipandu oleh tim dosen dari Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung sehingga dapat memunculkan keinginan, pendapat, pertanyaan dan saran dari para staf KPH Pesawaran. Penilaian hasil *pre test* dan *post test* merupakan hasil perhitungan dengan metode scoring yang memberikan bobot lebih tinggi pada pilihan jawaban yang sesuai. Evaluasi dampak PKM terhadap masyarakat berdasarkan jumlah skor dari setiap jawaban peserta PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dengan tema “Pelatihan Untuk Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia KPH Dalam Menanggulangi Dampak Sosial Ekonomi Petani Perhutanan Sosial Akibat Pandemi Covid-19” dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi *zoom* yang diakses dengan tautan link <https://bit.ly/31Xcsqt> dan melibatkan staf dan pengelola KPH, juga Lembaga-lembaga yang relevan sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai pada pukul 09.00 – 16.00 dengan peserta yang mengikuti berjumlah 20 orang. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan oleh Peergroup Manajemen Hutan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Gambar 1.). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada presentasi dari 4 orang narasumber, yaitu: “Penguatan Sumberdaya melalui Penguatan Kelembagaan dalam Menghadapi masa New Normal” oleh Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.,PU., kemudian “Peranan Modal Sosial Sebagai Variabel Kunci dalam Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia KPH” oleh Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., dilanjutkan dengan

“Penilaian Kesehatan Hutan Menggunakan SIPUT dalam masa New Normal”
oleh Dr. Rahmat Safe'i, S. Hut., M.Si dan “Adaptasi Sebagai Penguatan
Kapasitas SumberDaya Manusia KPH Terkait Covid-19” oleh Dr. Rudi Hilmato,
S.Hut., M.Si.



Gambar 1. Presentasi yang dilakukan oleh narasumber.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pengerjaan soal *pre test* yang diakses melalui link <https://forms.gle/aLBhnyE82A3dyqPY7>, peserta diberikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Tujuan dari kegiatan *pre test* yaitu untuk mengetahui pemahaman awal. Setelah penyampaian materi selesai dilakukan selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peserta kepada pemateri. Kegiatan PKM ditutup dengan pemberian soal *post test* selama 5 menit. Soal *post test* sama dengan soal *pre test* diberikan ke peserta PKM bertujuan untuk mengetahui perkembangan pemahaman peserta setelah diberikan materi. Hasil kegiatan diukur dari nilai pelaksanaan *pre-test* dan *post-test*. Grafik pada Gambar 2. menunjukkan bahwa 19 orang peserta meningkat nilai hasil jawaban antara *post-test* dibandingkan dengan nilai *pretest* seluruh peserta. Ada 1 orang peserta yang tetap skornya, dan beberapa peserta menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan. Berikut dilampirkan hasil perubahan nilai hasil *pre-test* dan *post-test*.



Gambar 2. Grafik perubahan hasil *pre test* dan *post test*

Pemahaman peserta atas materi-materi yang diberikan yang sekaligus merupakan ukuran tingkat keberhasilan dari kegiatan PKM nampak dari perbandingan nilai *pre test* dan *post test* dengan skala penilaian yang digunakan dari nilai 0 hingga 100. Setelah peserta diberikan materi, kemudian dilanjutkan pengisian soal pada form *post test* dan ternyata nilai peserta mengalami kenaikan, hal ini terlihat dari grafik yang terlampir. Hasil *pre test* menunjukkan bahwa peserta mendapatkan nilai rata-rata diatas 75 karena nilai terendah 50 dan tertinggi 90, hal ini menunjukkan bahwa peserta sudah banyak yang memahami mengenai uji kompetensi yang akan diberikan oleh kementerian. Setelah peserta diberikan materi, kemudian dilanjutkan pengisian soal pada form *post test* dan ternyata nilai peserta mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari grafik yang terlampir. Kenaikan skor menjadi sekitar 84 tidak begitu jauh dari nilai skor rata-rata pada *pre test*, hal ini menunjukkan bahwa secara umum peserta sudah paham materi yang telah diberikan. Dengan demikian materi-materi PKM program mendatang hendaknya lebih rinci baik teori dan ditambahkan adanya praktek agar program PKM benar-benar bisa menguatkan kapasitas SDM secara spesifik dan diperlukan di lapangan.

Kegiatan pelatihan melalui PKM dengan pemberian materi yang rinci baik teori dan praktek diperlukan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang pengoptimalan kapasitas SDM dan penguatan sistem kelembagaan serta sistem pengelolaan hutan yang tepat dan optimal sehingga berdampak positif pada kondisi sosial dan ekonomi petani perhutanan sosial di KPH Pesawaran meskipun sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Permasalahan di lapangan seringkali datang karena terbatasnya kapasitas, keahlian dan kompetensi masyarakat untuk menanggulangi dampak negatif

yang juga sekaligus untuk mendukung keberhasilan berbagai macam kegiatan, mulai dari menanam hingga berproduksi, termasuk menjaga harga komoditas agar tidak mengalami penurunan, yang berakibat petani kerap kali dirugikan.

SIMPULAN

Dari kegiatan PKM yang telah terlaksana dapat disimpulkan bahwa kapasitas SDM para staf KPH Pesawaran dalam menghadapi Pandemi COVID-19 sudah memadai. Terjadi peningkatan setelah 4 materi dari 4 orang dosen disampaikan. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan PKM memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kapasitas staf KPH Pesawaran, khususnya dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan program-program KPH untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi petani Perhutanan Sosial akibat Pandemi Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada KPH Pesawaran dan para berbagai pihak yang membantu dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kartodihardjo H, Nugroho B dan Putro H. R. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangn dan Implementasi*. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.
- [2] Kartodihardjo, H., Nugroho, B dan Putro, H. R. 2013. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): konsep, peraturan perundangan, dan implementasi*. Diterbitkan [dan] didistribusi oleh Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- [3] Kencana, I. S. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Buku. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Krott, m., Bader, A., Schusser, C., Devkota, R., Maryudi, A., Giessen, L dan Aurenhammer, H. 2014. Actor-centred power: the driving force in decentralised community based forest governance. *Jurnal Forest Policy and Economics*. 49:34-42.
- [5] Peters BG & Pierre J. 2007. *Introduction: the role of public administration in governing*. Dalam: *The Handbook of Public Administration*. Ibid (Eds). Sage, London. 394.
- [6] Supratman. 2008. Desain model pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (kph) di kabupaten mamuju provinsi sulawesi barat. *Jurnal Perennial*. 5(1):36-44.
- [7] Sylviani, S dan Hakim, I. 2014. Analisis tenurial dalam pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (kph): studi kasus kph gedong wani, provinsi lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11(4):309-322.
- [8] Syukur, M., Sujiprihati, S dan Yuniarti, R. 2012. *Teknik Pemuliaan Tanaman*.

- Penebar Swadaya. Jakarta.
- [9] Timanbunan, K. M. S. 2015. Kajian hukum terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan. *Jurnal Lex et Societati*. 3(8):54-64.
- [10] Wahyuni, S. 2003. Kinerja kelompok tani dalam sistem usaha tani padi dan metode pemberdayaannya. *Jurnal Litbang Pertanian*. 22(1):1-8,